

**ANALISA PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG**

*ANALYSIS OF THE APPLICATION OF FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEM IN
BAPENDA PADANG*

Yuni Hafizah, Nova Begawati

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Ekasakti Padang

Abstrak

Sistem akuntansi keuangan daerah dalam sebuah instansi pemerintah merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan. Seiring berkembangnya sistem akuntansi keuangan daerah yakni sistem *double entry* dan basis akrual yang dapat mewujudkan akuntabilitas publik. Objek penelitian ini adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Padang (SKPD) adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah Badan Pendapatan Kota Padang telah menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Deskriptif, hasil penelitian menggambarkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang sudah sesuai berdasarkan peraturan-peraturan Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Kata Kunci: Akuntansi, Pemerintah Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Abstract

Regional financial accounting system in a government agency is an important thing to note. Along with the development of regional financial accounting system that is double entry system and accrual base that can realize public accountability. The object of this study is the Padang City Revenue Board (SKPD) as the purpose of this study to determine whether the Padang City Revenue Board has implemented Regional Financial Accounting System in accordance with Government Regulation no. 71 Year 2010 on the application of accounting-based government accruals. The analytical method used is Descriptive Analysis, the results of the study illustrates that the Regional Financial Accounting System in the Revenue Board of the City of Padang is in accordance with the rules of Government Accounting in force.

Keywords: Accounting, Local Government, Regional Financial Accounting System

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Instansi Pemerintah sebuah kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Instansi pemerintah memiliki karekteristik tersendiri yang lebih terkesan sebagai lembaga politik daripada lembaga ekonomi.

Sebagaimana halnya perusahaan, instansi pemerintah juga berusaha untuk mencegah atau menghindari pemborosan dan hal-hal lain yang dianggap merugikan karena hal-hal demikian akan membawa pengaruh buruk bagi keuangan masing-masing instansi pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah Basis akrual untuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan.

Badan Pendapatan Daerah adalah organisasi yang memiliki tanggung jawab dalam pemungutan pendapatan daerah melalui pengkoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak dana perimbangan dan lain sebagainya. Penerapan sistem akuntansi yang telah diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah yaitu pada saat pencatatan transaksi keuangan tidak dijurnal hanya dicatat di BKU (buku kas umum).

Perumusan Masalah

Masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut Bagaimana penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010?

Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Manfaat dari penelitian ini, menambah wawasan penulis, khususnya untuk bidang akuntansi secara umum dan bidang akuntansi daerah secara khususnya dimana penulis dapat melihat secara langsung praktek akuntansi keuangan daerah yang diterapkan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 (Pasal 70 ayat 1), sistem akuntansi keuangan daerah adalah suatu sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penafsiran, dan peringkasan transaksi atas kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi.

Sistem Pencatatan

Sistem pencatatan (Halim,2002) adalah himpunan standar-standar akuntansi yang menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa lainnya harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan.

Sistem Penggolongan

Yaitu adanya penjurnalan dan melakukan posting ke buku besar sesuai dengan nomor perkiraan.

Sistem Pelaporan

Yaitu setelah semua proses diatas selesai maka akan didapat laporan keuangan yang berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keungan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

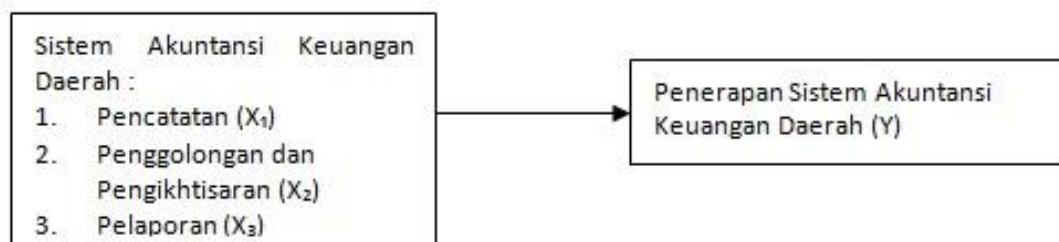
Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Kas Menuju AkruaI adalah Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju AkruaI menjadi penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Billy Rivaldy Pangalila, Sifrid S. Pangemanan, Jessy D. L. Warongan (2016) yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara telah menerapkan sistem akuntansi keuangan pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penarapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara sudah sesuai berdasarkan peraturan-peraturan Akuntansi Pemerintah yang berlaku dan perlu adanya penggantian nama akun pada laporan perubahan ekuitas.

Kerangka Konseptual



Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori yang telah dikemukakan maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Diduga tidak sesuai antara penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

H_A : Diduga sesuai antara penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang di Jalan Prof. M. Yamin, SH. Nomor 70 Padang, Sumatera Barat.

a. Sejarah Lokasi Penelitian

Pada tanggal 1 Maret 1906 lahir ordonansi yang menetapkan padang sebagai daerah *Cremence* (STAL 1906 No.151) yang berlaku 1 April 1906. Pada tanggal 9 Maret 1950 Padang dikembalikan ke tangan RI yang merupakan negara bagian melalui SK. Presiden RI Serikat (RIS), No. 111 tanggal 9 Maret 1950. Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 1950 SK. Gubernur Sumatera Tengah No. 65/GP-50, menetapkan Pemerintahan Kota Padang sebagai suatu daerah otonom sementara menunggu penetapannya sesuai UU No. 225 tahun 1948. Saat itu Kota Padang diperluas, kewedanaan Padang dihapus dan urusannya pindah ke Walikota Padang.

Metode Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan mengumpulkan data langsung dari lokasi penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu mempelajari buku-buku dan tulisan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, serta melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara atau bertanya langsung kepada pihak-pihak yang ada hubungannya dengan penelitian.

b. Teknik Dokumentasi

Yaitu metode pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang diperoleh dari bagian keuangan.

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

1. Data Kualitatif

Data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan. Jenis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

2. Data Kuantitatif

Data informasi yang berupa simbol angka atau bilangan. Jenis data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

b. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ada laporan keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang tahun 2016.

Defenisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati untuk mempermudah peneliti melakukan observasi secara cermat terhadap suatu objek penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat.

A. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel Bebas adalah variabel yang mempengaruhi, dan yang menyebabkan timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah:

a. Pencatatan

Pencatatan adalah melakukan pencatatan dengan menggunakan *double entry* dan menggunakan *cash basic* selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan *accrual basic* untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas pemerintah.

b. Penggolongan dan Pengikhtisaran

Yaitu adanya penjurnalan dan melakukan posting ke buku besar sesuai dengan nomor perkiraan.

c. Pelaporan

Yaitu setelah semua proses diatas selesai maka akan didapat laporan keuangan yang berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan.

B. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat adalah variabel yang di pengaruhi karena adanya variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yaitu, proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi, dari entitas pemerintah daerah yang di jadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas-entitas pemerintah daerah.

Metode Analisis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif:

Untuk permasalahan pada penelitian ini digunakan uji tanda memberikan tanda + (positif) jika penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Badan Pendapatan

Daerah Kota Padang dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan memberikan tanda - (negatif) jika tidak sesuai.

Metode Pengujian Hipotesis

Untuk mengetahui sesuai atau tidak sesuai penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 maka penulis akan mengujinya dengan membandingkan antara h-hitung dengan h-tabel berdasarkan taraf/tingkat kesalahan (α) = 5%, h-hitung dapat ditentukan berdasarkan jumlah dari tanda yang terjadi paling sedikit/terkecil. Pengujian hipotesis yang dapat dipakai untuk menguji sebagai berikut:

H_0 : $X = 0$ tidak terdapat kesesuaian antara penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan taraf nyata kesalahan (α) = 5% kemudian H_A : $X_1 \neq 0$ terdapat kesesuaian antara penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan taraf nyata kesalahan (α) = 5%.

Perbandingan antara h-hitung dengan h-tabel untuk menentukan nilai antara tanda positif (+) dengan tanda negatif (-), h-hitung digunakan ketentuan pada nilai perbandingan yang terkecil dengan h-tabel berdasarkan uji tanda dengan ketentuan yang digunakan adalah:

Apabila h-hitung \leq h-tabel, tolak H_A dan menerima H_0 dan sebaliknya apabila h-hitung \geq h-tabel tolak H_0 dan menerima H_A .

PEMBAHASAN

Sistem Pencatatan

a. Sistem Akuntansi Penerimaan Kas

Pendapatan meliputi semua penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi Kas Daerah.

Contoh jurnal Pendapatan-LO:

Badan Pendapatan Daerah Kota Padang menerima pendapatan selama tahun 2016 yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan yang sah. Maka dari itu Bendahara di Bapenda mencatat dengan jurnal sebagai berikut.

Tabel 4.1
Contoh Jurnal Pendapatan
Per 31 Desember 2016

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
31 Desember 2016	Kas di Bapenda Kota Padang Pendapatan	Rp. 41.226.372.150,00	Rp. 41.226.372.150,00

Sumber: data olahan penulis

Contoh jurnal Pendapatan-LRA:

Dari semua pendapatan yang diterima oleh BAPENDA Kota Padang tersebut kemudian akan disetor kepada Bendahara Umum Daerah selaku Kas Daerah pada hari

yang telah ditentukan maka dari itu jurnal yang dicatat oleh Bendahara Bapenda Kota Padang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Contoh Jurnal Penyetoran Pendapatan
Per 31 Desember 2016

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
31 Desember 2016	Rek. Kas Daerah (BUD) Kas di bendahara Bapenda Kota Padang	Rp. 41.226.372.150,00	Rp. 41.226.372.150,00

Sumber: data olahan penulis

b. Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas

Bapenda Kota Padang mengklarifikasi bahwa belanja terkelompokkan menjadi dua yaitu Belanja Langsung, dan Belanja Tidak Langsung.

Transaksi:

1. Akuntansi Belanja Uang Persediaan (UP)

Diketahui pada tahun 2016 Bendahara Bapenda Kota Padang melakukan pencairan Uang Persediaan (UP) atas pembayaran Tunjangan Gaji Pegawai sebesar Rp. 4.432.789.608,00

Tabel 4.3
Contoh Jurnal Pengeluaran Belanja
Per 31 Desember 2016

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
31 Desember 2016	Kas di Bend Bapenda Rek. Kas Bapenda	Rp. 4.432.789.608,00	Rp. 4.432.789.608,00

Sumber: data olahan penulis

2. Akuntansi Belanja Langsung (LS)

Diketahui pada tahun 2016 Bapenda Kota Padang menerima SP2D-LS untuk belanja alat tulis kantor kemudian diterima SP2D untuk belanja jasa kantor dan jasa servis sebesar Rp. 1.160.575.000,00.

Tabel 4.4
Contoh Jurnal Pengeluaran Belanja
Per 31 Desember 2016

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
31 Desember 2016	Belanja Alat Tulis Kantor Rek. Kas Bapenda	Rp. 1.160.575.000,00.	Rp. 1.160.575.000,00.

Sumber: data olahan penulis

Sistem Penggologan

1. Sistem Akuntansi Aset

Saldo Aset Badan Pendapatan Daerah Kota Padang per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 24.107.896.268,15 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.5
Aset Bapenda Kota Padang
Per 31 Desember 2016

No	Uraian	Tahun 2016 (Rp)
1	Aset Lancar	10.474.473.355,15
2	Investasi Jangka Panjang	00,0
3	Aset Tetap	12.544.430.913,00
4	Dana Cadangan	0,00
5	Aset Lainnya	1.088.992.000,00
	Jumlah Aset	24.107.896.268,15

Sumber: data olahan penulis

Transaksi:

1. Diketahui pada tahun 2016 Bapenda Kota Padang melakukan belanja peralatan sebesar Rp. 6.277.958.313,00 dengan jurnal sebagai berikut:

Tabel 4.6
Contoh Jurnal Transaksi Belanja Modal
Per 31 Desember 2016

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
31 Des 2016	Belanja Peralatan Estimasi perubahan SAL	Rp. 6.277.958.313,00	Rp. 6.277.958.313,00

Sumber: data olahan penulis

2. Jurnal untuk mencatat penambahan nilai aset:

Tabel 4.7
Contoh Jurnal Penambahan Nilai Aset
Per 31 Desember 2016

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
31 Des 2016	Aset Peralatan Diinvestasikan dalam aset tetap	Rp. 6.277.958.313,00	Rp. 6.277.958.313,00

Sumber: data olahan penulis

2. Sistem Akuntansi Kewajiban

Dalam hal ini pada SKPD yang diteliti yaitu Badan Pendapatan Daerah Kota Padang tidak memiliki kewajiban jangka pendek atau utang yang dibayar dalam jangka waktu 12 bulan, juga tidak memiliki kewajiban jangka panjang yaitu utang yang dibayar dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan.

3. Sistem Akuntansi Kewajiban

Dalam hal ini pada SKPD yang diteliti yaitu Badan Pendapatan Daerah Kota Padang tidak memiliki kewajiban jangka pendek atau utang yang dibayar dalam jangka waktu 12 bulan, juga tidak memiliki kewajiban jangka panjang yaitu utang yang dibayar dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan.

1) Ekuitas Dana Lancar

Saldo akun ini merupakan selisih antara jumlah aset lancar dengan hutang jangka pendek, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 9.200.162.735,15 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.8
Ekuitas Dana Lancar Bapenda Kota Padang
Per 31 Desember 2016

No	Uraian	Nilai (Rp)
(a)	Cadangan Piutang	10.069.244.643,15
(b)	Cadangan Persediaan	405.228.712,00
(c)	Pendapatan Yang Ditangguhkan	0,00
(d)	Pembayaran Utang Jangka Pendek	(1.274.310.620,00)
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar	9.200.162.735,15

Sumber: Bapenda Kota Padang

2) Ekuitas Dana Investasi

Saldo akun ini merupakan kekayaan Badan Pendapatan Kota Padang yang berasal dari selisih Investasi Jangka Panjang ditambah Aset tetap dan Aset Lainnya dikurangi Kewajiban Jangka Panjang, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 13.633.422.913,00 sebagai berikut:

Tabel 4.9
Ekuitas Dana Investasi Bapenda Kota Padang
Per 31 Desember 2016

No	Uraian	Nilai (Rp)
(a)	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	0,00
(b)	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	12.544.430.913,00
(c)	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	1.088.992.000,00
	Jumlah Ekuitas Dana Investasi	13.633.422.913,00

Sumber: data olahan penulis

4. Sistem Akuntansi Selain Kas

Setiap Akhir Periode akuntansi dan anggaran tahunan PPK-SKPD Badan Pendapatan Daerah Kota Padang membuat Laporan Realisasi.

Sistem Pelaporan**1. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2016 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja. Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 47.934.618.068,60 mencapai 116,27 % dari anggarannya. Realisasi belanja dan transfer pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 26.441.650.150.172,00 atau mencapai 98,70.% dari anggarannya.

2. Laporan Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2016 mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Jumlah aset per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 24.107.896.268,15 yang terdiri dari aset

lancar sebesar Rp. 10.474.473.355,15 investasi jangka panjang sebesar Rp 0,00, aset tetap sebesar Rp. 12.544.430.913,00 dana cadangan Rp. 0,00 dan aset lainnya sebesar Rp.1.088.992.000,00

Jumlah kewajiban per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 1.274.310.620,00 yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 1.274.310.620,00, dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp 0,00. Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 22.833.585.648,15 yang terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp. 9.200.162.735,15 ekuitas dana investasi sebesar Rp 13.633.422.913,00, dan ekuitas dana cadangan sebesar Rp.0,00

3. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Pembahasan

1. Uji Tanda

Untuk mengetahui bagaimana sistem akuntansi keuangan daerah yang diterapkan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang telah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 maka digunakan analisis uji tanda sebagai berikut:

Tabel 4.10

Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

No	SAP	Bapenda Kota Padang	PP No. 71 Th. 2010	Ket
1	Akuntansi Penerimaan Kas	Akuntansi penerimaan kas Bapenda Kota Padang terdiri dari Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA penerimaannya berasal dari PAD, Dana Perimbangan dan Pendapatan yang sah.	Akuntansi Penerimaan Kas Terdiri dari Pendapatan-LO dan LRA yang terdiri dari dari: PAD, Dana Perimbangan dan Pendapatan yang sah	(+)
2	Akuntansi Pengeluaran Kas	Akuntansi Pengeluaran Kas pada Bapenda Kota Padang terdiri dari beban dan belanja, belanja yaitu belanja uang persediaan dan belanja langsung.	Akuntansi pengeluaran kas terdiri dari belanja, beban, transfer, kewajiban dan pembiayaan.	(+)
3	Sistem Akuntansi Aset	Akuntansi Aset Bapenda Kota Padang terdiri dari aset lancar dan aset tetap yang dimilikinya	Akuntansi Aset terdiri dari aset lancar, aset tetap, aset lainnya dan aset bersejarah.	(+)

4	Sistem Akuntansi Kewajiban	Bapenda Kota Padang tidak memiliki kewajiban baik itu jangka panjang maupun jangka pendek.	Akuntansi kewajiban terdiri dari kewajiban jangka panjang dan jangka pendek.	(+)
5	Sistem Akuntansi Ekuitas	Sistem Akuntansi Ekuitas yang dimiliki oleh Bapenda Kota Padang adalah berupa kekayaan dan selisih antar aset dan kewajiban yang disusun dalam Neraca.	Sistem Akuntansi Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah dan merupakan selisih antara aset dan kewajiban	(+)
6	Sistem Akuntansi Selain Kas	Dalam hal ini semua sistem akuntansi selain kas dicatat dan dilaporkan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.	Sistem Akuntansi selain kas seluruhnya dicatat dan pelaporannya disusun oleh SKPKD yaitu didalamnya dalam proses dan pembuatan CALK.	(+)
7	Laporan Realisasi Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan yang mencakup unsur unsur pendapatan dan belanja	Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.	(+)
8	Laporan Neraca	Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.	Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.	(+)
9	Catatan Atas Laporan Keuangan	Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.	Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas.	(+)

2. Pengujian Hipotesis

Dalam hasil tabel diatas dari jumlah n sembilan (9), terdapat sembilan (9) bertanda positif dan 0 (nol) bertanda negatif, berdasarkan uji tanda dengan taraf atau tingkat kesalahan (α) = 5%, dengan h -hitung 9 dan h -tabel adalah 1 atau $h_{hitung} \geq h_{tabel}$ maka tolak H_0 dan menerima H_a yang artinya terdapat kesesuaian antara penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PP No. 71 Tahun 2010.
2. Berdasarkan uji tanda dengan taraf atau tingkat kesalahan (α) = 5%, dengan $h_{hitung} \geq h_{tabel}$ maka tolak H_0 dan menerima H_a yang artinya terdapat kesesuaian antara penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.
3. Pengelolaan keuangan daerah khususnya pada bidang pendapatan Kota Padang saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Tahun 2010 yang dimana Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintahannya dijalankan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

Saran

Dari hasil penelitian yang telah diteliti oleh penulis tentang “Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Pendapatan Kota Padang” sudah sesuai dengan pengecualian dimana adanya penyesuaian secara keseluruhan dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang baru yaitu berbasis akrual yang berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yaitu semua jajaran pemerintahan daerah telah menerapkannya pada tahun 2015 dan diharapkan kepada SKPD Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dapat mempertahankan apa yang sudah dicapai bahkan terus meningkatkan prosedur sistem akuntansinya. Dan untuk penyempurnaannya Badan Pendapatan Daerah Kota Padang disarankan agar dapat selalu mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada dan perubahan-perubahan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul, Halim, 2004, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta
- Abdul, Halim, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta
- Agussalim Manguluang, 2010, *Metode Penelitian*, Ekasakti Press, Padang
- Agussalim Manguluang, 2013, *Statistik*, Ekasakti Press, Padang
- Azhar, Susanto, 2013, *Sistem Informasi Akuntansi*, Lingga Jaya, Bandung
- Bodnar, George, H, & William, S.Hopwood, 2006, *Sistem Informasi Akuntansi*, Buku I, Salemba Empat, Jakarta
- Chestern A. Bernard dalam Subandi, *Sistem Informasi Akuntansi*, 2008
- Ismail, 2010, *Akuntansi Bank*, Kencana, Bandung
- Komite American Institute of Certified Public Accountant dalam Kusnadi, *Teori Akuntansi*, 2005
- Mulyadi, 2010, *Sistem Akuntansi*, Salemba Empat, Jakarta
- Nugroho, Wijayanto, 2009, *Sistem Informasi Akuntabsi*, Erlangga, Jakarta

Peraturan-Peraturan:

- Peraturan Pemerintah Republik Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Keuangan Daerah, Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Jurnal-Jurnal:

- Billy Rivaldy, P., Sifrid, S., Pangemanan, & Jessy, D., L., Warongan, 2016, Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Volume 16 No. 04 Tahun 2016.
- Dewi Andini, & Yusrawati. 2015, Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, Volume 24 No. 1 2015.
- Febriana, F., Albugis, 2016, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Volume 4 No. 3 2016
- Nurhayati Soleha, 2014, Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan, Volume 13 No. 1 2014
- Sri Megawati, Erni Sulindawati, Edy Sujana, 2015, Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Volume 3 No. 1 Tahun 2015.